

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pentingnya informasi dari suatu analisis terhadap data laporan keuangan menjadi kebutuhan publik dalam era sekarang ini, hal ini karena pola pikir dan kehidupan masyarakat yang semakin maju. Hal ini juga didukung oleh kebijakan-kebijakan dan sistem pemerintah yang menginginkan semua program-program khususnya yang berkaitan dengan dana sosial atau program pengentasan kemiskinan untuk dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Analisis laporan keuangan sangat menarik dan dinamis. Laporan keuangan sangat relevan untuk keputusan berbagai individu, seperti investor, kreditor, konsultan, manajer, auditor, direktur, analis, pemerintah, dan karyawan (Subramanyam dan Wild, 2010:IV). Subramanyam dan Wild (2010:4), juga menyebutkan bahwa analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis.

Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Sedangkan menurut Harahap (2006:210), pengertian analisa laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara yang satu dengan yang lainnya baik antara data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan. Dengan

demikian, hasil analisis dari suatu laporan keuangan mempunyai manfaat penting untuk membantu dalam menyajikan informasi kondisi keuangan dengan estimasi yang lebih akurat.

Dari hasil analisis tersebut, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja suatu entitas sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau ditargetkan sebelumnya oleh entitas tersebut. Menurut Bastian (2006:275), pengukuran kinerja merupakan alat manajemen dalam memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja, memastikan dalam hal tercapainya skema kinerja yang disepakati, mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan objektif, menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan, mengungkapkan permasalahan yang terjadi, dan sebagainya. Peningkatan suatu kinerja dapat diukur melalui analisis rasio laporan keuangan dengan membandingkan angka-angka tertentu dalam laporan keuangan yang dikalikan 100% sehingga menunjukkan nilai yang relatif atau proporsi diantara dua angka yang digunakan.

Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada awal tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997 mendorong pemerintah untuk membuat program yang mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan lintas sektoral dan mendesak yang memerlukan langkah-langkah penanganan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh, (Pedoman Mekanisme PNPM Mandiri, 2009:2). Oleh karena itu, salah satu program yang dibuat pemerintah dalam upaya mengurangi dampak

krisis tersebut adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan perkembangannya sampai saat ini menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dibawah naungan Departemen Pekerjaan Umum. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dengan menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang *representative*, mengakar, dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*Social Capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat (Pedoman Pelaksanaa PNPM Mandiri Perkotaan, 2009:3).

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2009:13), Tujuan umum PNPM Mandiri Perkotaan yaitu “meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara madani”. Tujuan khusus dari PNPM Mandiri Perkotaan yaitu “Membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan atau desa peserta program mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata pemerintahan yang baik”. Program ini berusaha membentuk organisasi-organisasi pada tingkat kelurahan suatu daerah yang dipimpin dan beranggotakan para relawan-relawan masyarakat daerah tersebut. Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, *representative*, dan dipercaya tersebut (secara umum disebut, Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai

pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2009:3). BKM ini diharapkan menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi “motor” bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ini mengelola dana dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2009:12), bantuan untuk masyarakat ini dapat dibagi menjadi bantuan bentuk pendampingan dan bantuan stimulan dana BLM. Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing. Sedangkan bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan sesuai dengan musyawarah dan kebutuhan masyarakat miskin di daerah tersebut. Seperti yang tertera pada PERMENPERA 14 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), Bantuan stimulan adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Oleh karena

BKM tersebut mengelola dana dari pemerintah, organisasi tersebut diharuskan mempertanggungjawabkan segala kegiatan tersebut sehingga sasaran pemerintah untuk menciptakan BKM yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel dapat terpenuhi.

Penelitian yang terkait dengan analisis kinerja keuangan dilakukan oleh Ghozali (2013), yang meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan APBD (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan). Peneliti menyimpulkan bahwa hasil perhitungan atas analisis laporan keuangan menunjukkan jika Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan harus meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan dana eksternal dari pemerintah pusat dan provinsi serta khusus Kabupaten Pamekasan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 rasio likuiditas dan rasio utang semakin buruk sehingga jika menambah saldo utang, kemungkinan Kabupaten Pamekasan akan mengalami kelebihan utang.

Berdasarkan pemaparan penelitian tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan analisa laporan keuangan untuk mengukur kinerja suatu entitas dengan objek dan alat analisis yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian Ghozali (2013) menggunakan objek penelitian berupa laporan keuangan APBD pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian laporan keuangan seluruh BKM yang ada di Kabupaten Sumenep periode 2010-2014. Persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengetahui kinerja suatu entitas. Peneliti memilih BKM yang ada di Kabupaten

Sumenep karena dari jumlah total BKM yang ada di pulau Madura, di Kabupaten Sumenep terdapat jumlah BKM paling banyak yaitu 23 BKM, selanjutnya jumlah BKM Kabupaten Pamekasan yaitu 18 BKM dan jumlah BKM Kabupaten Bangkalan yang berjumlah 13 BKM. Kabupaten Sumenep juga tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, khususnya untuk propinsi Jawa timur yaitu 225.500 jiwa (Badan Pusat Statistik). Sehingga peneliti mengangkat tema “Anilisis Kinerja Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Melalui Analisis Rasio Keuangan (Studi Kasus pada BKM Kabupaten Sumenep 2010-2014)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan masalah tersebut, rumusan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan BKM Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2010-2014 berdasar pada analisis rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), *total debt to equity ratio*, *total debt to total capital asset ratio*, *total asset turnover*, *net profit margin*, *return on investment*, *cost coverage ratio* dan analisis *trend*?

1.3. Tujuan Penelitian :

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi pemahaman tentang :

1. Kinerja keuangan BKM Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2010-2014 berdasar pada analisis rasio lancar (*current ratio*), rasio

kas (cash ratio), total debt to equity ratio, total debt to total capital asset ratio, total asset turnover, net profit margin, return on investment, cost coverage ratio dan analisis trend

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Sebagai informasi keuangan mengenai pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam satu tahun buku berjalan serta dapat dijadikan bahan evaluasi tentang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu dalam pengambilan keputusan sehingga dapat mengukur kinerja suatu program yang telah dilaksanakan.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Dapat menjadi bahan referensi dan data bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan bidang kajian ini

4. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menjadi bahan penilaian dan fungsi kontrol tentang kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di Daerah Kelurahan Perkotaan masyarakat tersebut.